

BAB II

Invasi Militer Rusia ke Ukraina

Bab ini akan mengulas secara komprehensif tentang invasi militer Rusia ke Ukraina, sebuah peristiwa yang telah mengubah lanskap geopolitik Eropa dan dunia. Invasi ini, yang dimulai pada 24 Februari 2022, merupakan eskalasi dramatis dari konflik yang telah berlangsung sejak 2014. Bab ini akan menggali berbagai aspek dari invasi tersebut, mulai dari akar penyebabnya hingga perkembangan terkini di lapangan. Penulis akan menelusuri faktor-faktor kompleks yang mendorong Rusia untuk melancarkan serangan militer berskala besar terhadap negara tetangganya, menganalisis kronologi peristiwa-peristiwa kunci, dan mengevaluasi dampaknya terhadap kondisi human security di Ukraina. Pembahasan ini akan memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami dinamika konflik yang sedang berlangsung dan implikasinya terhadap keamanan regional serta global.

2.1 Penyebab Invasi Militer Rusia ke Ukraina

Invasi militer Rusia ke Ukraina pada 2022 merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor eksternal dan faktor internal Ukraina. Faktor eksternal mencakup dinamika geopolitik yang lebih luas, termasuk hubungan Rusia dengan negara-negara Barat dan isu-isu strategis regional. Sementara itu, faktor internal Ukraina meliputi situasi politik domestik, konflik etnis, dan ketegangan regional yang telah lama ada di dalam negeri. Pemahaman mendalam tentang kedua aspek ini sangat penting untuk mengerti motivasi dan strategi di balik keputusan Rusia untuk melancarkan invasi. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi secara rinci bagaimana interaksi antara faktor eksternal dan internal ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya invasi, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan konflik yang sedang berlangsung.

2.1.1 Faktor Eksternal

Invasi militer Rusia ke Ukraina pada 2022 dipengaruhi oleh faktor eksternal yang signifikan, terutama intervensi geopolitik dari kekuatan luar seperti negara-negara Barat dan organisasi internasional. Peran utama dalam konflik ini adalah dukungan politik dan militer yang diberikan oleh negara-negara Barat kepada Ukraina,

termasuk bantuan persenjataan dan sanksi terhadap Rusia sebagai respons terhadap agresi sebelumnya di Kepulauan Krim. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Ukraina dalam menghadapi invasi, tetapi juga memperpanjang ketegangan antara Rusia dan Barat, memperumit upaya perdamaian dan penyelesaian konflik (Williams & Hoffman, 2022).

Hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina. Sejarah hubungan ini dapat ditelusuri kembali ke awal 1990-an, ketika berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet membuka peluang baru untuk kerjasama. Namun, harapan akan hubungan yang harmonis mulai memudar seiring dengan ekspansi NATO dan Uni Eropa ke wilayah Eropa Timur, termasuk Ukraina, yang dianggap Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanannya.

Keputusan Ukraina untuk mendekatkan diri dengan Barat semakin memperkeruh situasi. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan dukungan kuat kepada pemerintah Ukraina yang pro-Barat, baik dalam bentuk bantuan ekonomi maupun militer. Hal ini memicu reaksi keras dari Rusia, yang berujung pada aneksasi Krimea dan dukungan terhadap kelompok separatis di Ukraina Timur. Sebagai respons, AS dan UE memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, yang semakin memperburuk hubungan diplomatik.

Invasi militer Rusia ke Ukraina menjadi titik kritis dalam dinamika ini. AS dan UE mengambil sikap tegas dengan mengecam tindakan Rusia, meningkatkan sanksi, dan memperkuat dukungan mereka terhadap Ukraina. Uni Eropa juga berupaya menjadi mediator dalam mencari solusi diplomatik. Namun, tekanan dari Barat ini justru mendorong kebijakan luar negeri Rusia menjadi lebih nasionalis dan defensif, dengan fokus pada mempertahankan pengaruhnya di kawasan.

Dukungan Barat terhadap Ukraina telah memperkuat posisi negara tersebut dalam negosiasi dan memberikan tekanan signifikan pada Rusia. Meskipun sanksi ekonomi berdampak pada perekonomian Rusia, mereka juga memperkuat sentimen anti-Barat di dalam negeri. Situasi ini menciptakan lingkaran sengketa yang kompleks, di mana kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina tidak hanya dipengaruhi oleh

kepentingan regionalnya, tetapi juga oleh dinamika hubungannya dengan kekuatan-kekuatan Barat.

Hubungan Rusia dengan AS dan UE adalah elemen kunci dalam konteks konflik Ukraina dan invasi militer Rusia. Ini adalah faktor yang membentuk kebijakan luar negeri Rusia dan memengaruhi perkembangan konflik tersebut.(Atok, 2022)

Pada tahun 2014, Rusia menganeksasi Kepulauan Krim yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina, yang memicu kecaman internasional dan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Ketegangan semakin memburuk seiring waktu, terutama setelah Ukraina mendekatkan diri dengan Barat dan berupaya untuk bergabung dengan NATO, sebuah aliansi yang dipandang Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Menurut penelitian oleh para ahli, invasi tersebut juga didorong oleh keinginan Rusia untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut serta untuk memperkuat posisi geopolitiknya di Eropa Timur (Forsberg, 2023).

Kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Keamanan regional menjadi perhatian utama Rusia, yang memandang ekspansi NATO dan Uni Eropa ke wilayah bekas pengaruhnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Rusia merasa terdesak oleh pergeseran aliansi militer yang semakin mendekat ke perbatasannya, memicu respons defensif yang agresif.

Pengaruh geopolitik juga menjadi pertimbangan krusial. Rusia berupaya mempertahankan kontrolnya atas wilayah-wilayah strategis seperti Krim, yang memberikan akses vital ke Laut Hitam dan memiliki nilai tinggi dalam hal pengaruh regional serta kontrol atas jalur transportasi penting. Selain itu, kehadiran populasi etnis Rusia yang signifikan di Krim dan Donbas memberikan justifikasi tambahan bagi Rusia untuk campur tangan, dengan alasan melindungi kepentingan etnis Rusia di luar negeri.

Kekuatan militer Rusia yang besar dan modern menjadi faktor pendukung dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan militer di wilayah yang dianggap strategis. Hal ini diperkuat oleh pertimbangan politik dan identitas nasional, di mana upaya mempertahankan pengaruh dan menunjukkan keberhasilan geopolitik menjadi bagian integral dari citra Rusia sebagai kekuatan global.

Aspek ekonomi juga tidak luput dari perhitungan strategis Rusia. Ukraina kaya akan sumber daya alam, termasuk gas alam dan logam, yang menjadikannya target menarik untuk kontrol ekonomi. Penguasaan atas sumber daya ini dapat memberikan keuntungan ekonomi signifikan bagi Rusia, sekaligus memperkuat posisi geopolitiknya. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina merupakan hasil dari perpaduan kompleks antara kepentingan keamanan, ambisi geopolitik, pertimbangan etnis, kekuatan militer, dinamika politik internal, dan tujuan ekonomi. Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk pendekatan Rusia yang agresif dan ekspansionis terhadap tetangganya, mencerminkan upaya untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di kawasan yang dianggap sebagai wilayah kepentingan strategisnya.

Kombinasi dari isu-isu geopolitik, strategis, keamanan regional, dan kontrol atas wilayah membuat keputusan Rusia untuk melakukan invasi militer di Ukraina kompleks. Ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berinteraksi dan saling memengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.(Widiasa, 2018)

2.1.2 Faktor Internal Ukraina

Faktor internal yang menyebabkan invasi militer Rusia ke Ukraina pada 2022 meliputi ketegangan politik dalam negeri di Ukraina, terutama terkait dengan konflik internal antara pendukung kebijakan pro-Barat dan kelompok pro-Rusia. Pasca-revolusi Oranye pada 2004 dan Euromaidan pada 2014, Ukraina mengalami perpecahan yang dalam antara bagian-bagian yang mendukung integrasi lebih dekat dengan Eropa dan yang mempertahankan hubungan tradisional dengan Rusia. Konflik ini menciptakan kesempatan bagi Rusia untuk memanfaatkan ketidakstabilan dalam politik domestik Ukraina dan mengeksploitasi perpecahan internal untuk tujuan geopolitiknya. Dalam konteks ini, keputusan Rusia untuk menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi Ukraina tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal tetapi juga oleh dinamika politik internal yang kompleks di Ukraina itu sendiri. (Wilson A, 2023)

Sebelum invasi Rusia, Ukraina mengalami dinamika politik yang kompleks pasca-revolusi Euromaidan tahun 2014, yang melibatkan pergantian kekuasaan dari Presiden Viktor Yanukovych dan konflik bersenjata di wilayah Donbas antara pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia. Pemerintah pasca-Maidan berusaha keras untuk melakukan reformasi institusional dan ekonomi, sambil menghadapi tantangan korupsi yang meluas dan ketegangan politik dengan Rusia. Integrasi Ukraina dengan Uni Eropa juga menjadi fokus utama, yang menjadi pemicu ketegangan lebih lanjut dengan Rusia. (Gower & Umland, 2019)

Situasi politik di Ukraina sebelum invasi Rusia ditandai oleh serangkaian peristiwa penting yang mencerminkan dinamika kompleks antara aspirasi pro-Barat dan pengaruh pro-Rusia. Dimulai dengan Revolusi Oranye pada tahun 2004, Ukraina menyaksikan gelombang protes massal yang menuntut demokrasi dan orientasi kebijakan yang lebih condong ke Barat. Revolusi ini berhasil mengantarkan Viktor Yushchenko, seorang kandidat pro-Barat, ke kursi kepresidenan. Namun, lanskap politik Ukraina kembali bergeser pada tahun 2010 dengan terpilihnya Viktor Yanukovych sebagai presiden. Yanukovych, yang lebih condong ke Rusia, mengubah arah kebijakan luar negeri Ukraina, memperkuat hubungan dengan Moskow dan mendinginkan hubungan dengan Barat. Keputusannya untuk menolak perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa pada tahun 2013 memicu krisis politik yang kemudian berkembang menjadi Revolusi Martabat (Revolution of Dignity).

Protes massal yang dikenal sebagai "Majdan Nezalezhnosti" mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Yanukovych pada Februari 2014. Pergantian kekuasaan ini membawa pemerintahan interim yang lebih pro-Barat ke tampuk kekuasaan, dengan Oleksandr Turchynov sebagai pejabat presiden sementara dan Arseniy Yatsenyuk sebagai perdana menteri. Perubahan politik ini memiliki konsekuensi besar. Di Semenanjung Krim, referendum kontroversial pada Maret 2014 mengakibatkan wilayah tersebut bergabung dengan Rusia, sebuah tindakan yang dikecam oleh komunitas internasional sebagai ilegal. Sementara itu, di wilayah timur Ukraina, khususnya di Donetsk dan Luhansk, ketidakpuasan terhadap perubahan pemerintahan di Kiev memicu konflik bersenjata. Kelompok-kelompok separatis, yang diduga mendapat dukungan dari Rusia, mulai memperjuangkan kemerdekaan dari Ukraina.

Rangkaian peristiwa ini menggambarkan betapa kompleksnya situasi politik di Ukraina, yang terjebak di antara tarikan ke arah Barat dan pengaruh kuat dari Rusia. Polarisasi ini tidak hanya mempengaruhi politik dalam negeri, tetapi juga membentuk dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan tersebut, menciptakan kondisi yang akhirnya mengarah pada invasi Rusia.

Perubahan-perubahan politik yang terjadi di Ukraina sebelum invasi Rusia menciptakan ketidakstabilan politik dan konflik internal. Pergeseran antara orientasi pro-Barat dan pro-Rusia dalam kepemimpinan dan kebijakan luar negeri membentuk latar belakang konflik yang berkembang menjadi invasi militer Rusia di Ukraina. Faktor-faktor ini adalah bagian penting dari konteks yang perlu dipahami untuk memahami bagaimana konflik tersebut berkembang. (Rio & Levina, 2022).

Invasi militer Rusia ke Ukraina juga dipengaruhi oleh faktor etnis dan regional yang kompleks di wilayah tersebut. Ukraina memiliki sejarah panjang konflik internal antara penduduk yang berbahasa Rusia di bagian timur dan selatan negara ini, yang cenderung lebih mendukung hubungan dekat dengan Rusia, dan mayoritas berbahasa Ukraina di bagian barat dan tengah, yang lebih mendukung integrasi Eropa. Konflik ini mencerminkan dinamika regional dan etnis yang dalam, yang dimanfaatkan oleh Rusia untuk membenarkan campur tangan militer dan menciptakan ketegangan yang berkelanjutan di Ukraina. (Gorenburg, 2021)

Konflik di Ukraina memiliki akar yang dalam pada isu-isu etnis dan regional yang kompleks. Negara ini merupakan mosaik etnis yang beragam, dengan mayoritas penduduk beretnis Ukraina, namun juga memiliki minoritas etnis Rusia yang signifikan, terutama di wilayah timur dan selatan. Keberagaman ini diperkaya oleh kehadiran kelompok-kelompok minoritas lainnya, seperti Tatar Krimea dan etnis Romania di barat daya.

Bahasa menjadi salah satu isu sentral dalam dinamika ini. Meskipun bahasa Ukraina adalah bahasa resmi negara, penggunaan bahasa Rusia masih luas, terutama di daerah-daerah dengan populasi etnis Rusia yang besar. Hal ini telah menciptakan perdebatan yang sensitif mengenai status bahasa Rusia di beberapa wilayah,

mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara identitas nasional Ukraina dan pengaruh budaya Rusia.

Konflik identitas menjadi lebih rumit dengan adanya perbedaan sentimen regional yang kuat. Di wilayah timur, banyak penduduk merasa lebih terhubung dengan Rusia, sementara di barat daya, terutama di daerah seperti Galisia, terdapat dukungan kuat untuk orientasi pro-Barat dan keanggotaan dalam Uni Eropa. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan preferensi politik, tetapi juga menggambarkan perbedaan mendalam dalam persepsi identitas nasional dan kultural.

Kebijakan pemerintah dalam hal bahasa dan pendidikan telah semakin mempertajam perbedaan-perbedaan ini. Upaya untuk mempromosikan penggunaan bahasa Ukraina di berbagai sektor publik, meskipun bertujuan untuk memperkuat identitas nasional, telah menimbulkan rasa terpinggirkan di kalangan kelompok-kelompok minoritas tertentu.

Selain itu, isu kepemilikan tanah dan sumber daya alam, terutama di wilayah timur yang kaya akan batu bara dan logam, telah menambah kompleksitas konflik. Persaingan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya ini sering kali tumpang tindih dengan garis-garis etnis dan regional, menambah potensi ketegangan. Keseluruhan dinamika ini menciptakan lanskap politik dan sosial yang sangat kompleks di Ukraina. Perbedaan etnis, bahasa, identitas regional, dan kepentingan ekonomi saling berinteraksi, membentuk narasi konflik yang jauh lebih rumit dari sekadar pertentangan antara pro-Barat dan pro-Rusia. Pemahaman mendalam tentang nuansa-nuansa ini sangat penting untuk memahami akar konflik dan mencari solusi yang berkelanjutan bagi masa depan Ukraina.

Kombinasi dari isu-isu etnis dan regional ini telah membentuk latar belakang yang kompleks dalam konflik di Ukraina. Perbedaan dalam identitas etnis dan sentimen regional telah menciptakan ketidaksetaraan dalam persepsi politik dan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah di Kiev, yang akhirnya memainkan peran penting dalam perkembangan konflik Ukraina, termasuk invasi militer Rusia.(Widiasa, 2018)

2.2 Proses Invasi Militer Rusia ke Ukraina

2.2.1 Invasi Krim

Invasi Rusia ke Krimea dimulai dengan pengambilalihan wilayah tersebut oleh pasukan Rusia tanpa identifikasi yang jelas. Konflik dimulai setelah kelompok-kelompok bersenjata pro-Rusia mengambil alih bangunan pemerintah di Krimea pada Februari 2014, di tengah ketegangan politik pasca-revolusi di Ukraina. Tindakan ini kemudian diikuti dengan referendum kontroversial untuk memisahkan diri dari Ukraina, yang disertai dengan intervensi militer langsung oleh Rusia. (Wilson, 2016)

Pengambilalihan Krim oleh Rusia pada tahun 2014 merupakan serangkaian peristiwa yang berlangsung cepat dan dramatis, dimulai dengan meningkatnya ketegangan di awal tahun tersebut. Setelah jatuhnya pemerintahan Yanukovych di Kiev, sentimen pro-Rusia di Krim, yang memiliki populasi etnis Rusia yang signifikan, mulai memuncak. Demonstrasi mendukung Rusia bermunculan di berbagai kota, terutama di Sevastopol, basis angkatan laut Rusia di Laut Hitam.

Titik balik terjadi pada 27 Februari 2014, ketika pasukan bersenjata tanpa identifikasi, yang kemudian dikenal sebagai "little green men", muncul di Semenanjung Krim. Pasukan ini, yang diduga kuat merupakan unit khusus Rusia, dengan cepat mengambil alih pos-pos militer dan gedung-gedung pemerintahan strategis. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka memperluas kendali mereka ke berbagai instalasi penting, termasuk bandara dan pangkalan militer, serta mengepung fasilitas militer Ukraina.

Puncak dari krisis ini terjadi pada 16 Maret 2014, ketika sebuah referendum kontroversial diadakan di bawah pengawasan ketat militer Rusia. Hasil referendum, yang diklaim mendukung penggabungan dengan Rusia, segera diikuti oleh pengumuman formal dari pemerintah Rusia tentang aneksasi Krim. Tindakan ini memicu kecaman keras dari komunitas internasional, dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan banyak negara lain memberlakukan sanksi terhadap Rusia. PBB juga mengeluarkan resolusi yang mengutuk referendum dan pengambilalihan tersebut.

Pasca pengambilalihan formal, Rusia dengan cepat mengkonsolidasikan kontrolnya atas Krim. Pangkalan-pangkalan militer Ukraina di wilayah tersebut diambil alih, dan Krim menjadi bagian integral dari sistem pertahanan Rusia di Laut

Hitam. Peristiwa ini menandai perubahan geopolitik yang signifikan di kawasan tersebut, dengan implikasi jangka panjang bagi hubungan internasional dan keamanan regional.

Pengambilalihan Krim oleh Rusia merupakan contoh nyata dari taktik "hybrid warfare", di mana operasi militer konvensional dikombinasikan dengan strategi informasi dan psikologis. Peristiwa ini tidak hanya mengubah peta geopolitik Eropa Timur, tetapi juga menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara Rusia dan Barat, serta menantang prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan integritas teritorial negara-negara merdeka.

Proses pengambilalihan Krim oleh Rusia telah dipandang oleh banyak negara sebagai pelanggaran hukum internasional dan merusak integritas wilayah Ukraina. Konflik di Krim menjadi pemicu awal dari konflik lebih luas di Ukraina Timur antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia. (Blank , 2020)

Respons internasional terhadap aneksasi Kepulauan Krim oleh Rusia pada tahun 2014 sangatlah signifikan, dengan sejumlah negara dan organisasi internasional mengutuk tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai respons langsung atas tindakan tersebut. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam aneksasi Kepulauan Krim dan meminta Rusia untuk menghormati kedaulatan Ukraina. Meskipun respons internasional ini tidak secara langsung mencegah aneksasi, mereka menunjukkan solidaritas global dalam mendukung integritas teritorial Ukraina dan menekankan pentingnya aturan hukum internasional dalam menanggapi konflik internasional. (Tsygankov, 2015)

Invasi Rusia ke Krimea pada tahun 2014 memicu serangkaian reaksi yang kuat dan beragam dari komunitas internasional. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengambil langkah-langkah tegas sebagai tanggapan. Mereka memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Rusia, termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pembatasan perdagangan. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Rusia atas pelanggaran kedaulatan

Ukraina. Selain itu, AS dan UE juga mengambil langkah-langkah untuk mengisolasi Rusia secara politik, seperti menangguhkan partisipasi Rusia dalam G8 dan membatalkan pertemuan G8 yang direncanakan di Sochi.

Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga bereaksi terhadap situasi ini. Dewan Keamanan PBB berupaya untuk mengadopsi resolusi yang mengecam tindakan Rusia di Krim dan menyatakan ketidaksahan referendum di wilayah tersebut. Namun, upaya ini terhambat oleh penggunaan hak veto Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.

Reaksi dari negara-negara lain di seluruh dunia juga signifikan. Banyak negara mengutuk invasi Rusia dan menyatakan dukungan mereka terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Negara-negara yang memiliki masalah serupa dengan Rusia, seperti Georgia dan Moldova, menunjukkan keprihatinan khusus terhadap situasi ini.

Sementara itu, Rusia tetap mempertahankan posisinya. Pemerintah Rusia bersikeras bahwa referendum di Krim adalah sah dan bahwa tindakan mereka bertujuan untuk melindungi penduduk etnis Rusia di wilayah tersebut. Mereka juga menolak sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap mereka, menganggapnya sebagai tindakan yang tidak berdasar.

Organisasi regional seperti Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) juga mengambil peran aktif dalam menanggapi krisis ini. OSCE mengirimkan misi pengamat ke Ukraina untuk memantau situasi di Krim dan wilayah-wilayah lain yang terkena dampak konflik.

Reaksi-reaksi ini mencerminkan kompleksitas situasi geopolitik yang ditimbulkan oleh invasi Rusia ke Krimea. Tindakan kolektif dari berbagai negara dan organisasi internasional menunjukkan keprihatinan global terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan upaya untuk mempertahankan tatanan internasional yang berbasis aturan. Namun, efektivitas sanksi dan tindakan diplomatik ini dalam mengubah perilaku Rusia tetap menjadi subjek perdebatan, menggambarkan tantangan yang dihadapi komunitas internasional dalam menangani konflik semacam ini.

Tanggapan internasional terhadap invasi Krim mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina dan peraturan

internasional. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS dan UE merupakan langkah penting dalam memberikan tekanan kepada Rusia sebagai respons atas tindakan tersebut. Namun, upaya diplomatik untuk mengatasi konflik tersebut tetap sulit, dan situasi di Krim tetap menjadi sumber ketegangan regional dan internasional. (Hakim & Sadiyin, 2022)

2.2.2 Konflik di Donbas

Konflik di Donbas adalah konflik bersenjata yang berkecamuk sejak tahun 2014 antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia di wilayah timur Ukraina, terutama di wilayah Donetsk dan Luhansk. Konflik ini dimulai setelah aneksasi Kepulauan Krim oleh Rusia, diikuti dengan protes dan kekerasan di kota-kota di Donbas yang menyebabkan pemerintah Ukraina melakukan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan separatis. Konflik ini terus berlanjut meskipun upaya mediasi internasional, termasuk perjanjian-perjanjian Minsk yang dirancang untuk mencapai gencatan senjata dan penyelesaian politik. (Gorey M., 2020)

Konflik di Donbas, yang dimulai pada tahun 2014 menyusul pengambilalihan Krimea oleh Rusia, telah menjadi salah satu krisis yang paling berkepanjangan dan kompleks di Eropa. Berawal dari deklarasi kemerdekaan oleh penduduk di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang menyebut diri mereka sebagai "Republik Rakyat" namun tidak diakui secara internasional, konflik ini dengan cepat berkembang menjadi pertempuran terbuka antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia.

Periode 2014 hingga awal 2015 ditandai oleh pertempuran yang sangat intensif. Kota-kota seperti Donetsk dan Luhansk menjadi medan perang utama, dengan kedua belah pihak menerima dukungan militer dari luar. Akibatnya, wilayah ini mengalami kerusakan infrastruktur yang parah dan jumlah korban jiwa yang signifikan.

Upaya perdamaian dilakukan melalui Perjanjian Minsk, dengan dua kesepakatan utama - Minsk I pada September 2014 dan Minsk II pada Februari 2015. Perjanjian-perjanjian ini, yang dimediasi oleh OSCE, bertujuan untuk menghentikan pertempuran dan menciptakan kerangka kerja untuk penyelesaian politik. Namun,

implementasi perjanjian ini terbukti sulit, dengan gencatan senjata yang sering dilanggar dan perbedaan interpretasi yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat.

Hingga tahun 2023, konflik di Donbas masih belum terselesaikan. Pertempuran sporadis terus terjadi, dan Perjanjian Minsk II belum sepenuhnya dilaksanakan. Situasi ini mencerminkan kompleksitas konflik dan sulitnya mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Konsekuensi humaniter dari konflik ini sangat berat. Banyak warga sipil kehilangan tempat tinggal, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi terbatas, dan bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional menjadi sangat diperlukan untuk membantu mereka yang terdampak.

Kehadiran pasukan asing dan dukungan Rusia kepada kelompok separatis telah menjadi isu krusial dalam konflik ini. Laporan-laporan tentang keterlibatan langsung Rusia, baik melalui personel militer maupun dukungan logistik, telah meningkatkan kompleksitas situasi dan menjadikan konflik ini sebagai titik panas dalam hubungan internasional.

Konflik di Donbas tidak hanya merupakan pergulatan internal Ukraina, tetapi juga mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas antara Rusia dan Barat. Resolusi konflik ini tetap menjadi tantangan besar, memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dan dukungan konstruktif dari komunitas internasional.

Perkembangan konflik di Donbas adalah masalah yang kompleks dan belum terselesaikan. Meskipun ada upaya untuk mencapai perdamaian melalui perjanjian Minsk, ketegangan dan pertempuran terus berlanjut. Konflik ini telah memiliki dampak yang signifikan pada Ukraina, wilayah Donbas, dan hubungan internasional, dan menciptakan tantangan besar dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Konflik di wilayah Donetsk dan Luhansk (Donbas) melibatkan berbagai pihak yang memainkan peran penting dalam dinamika konflik tersebut. Pemerintah Ukraina, dipimpin oleh presiden dan parlemen yang berbasis di Kiev, berupaya mempertahankan integritas wilayahnya, termasuk Donbas. Pemerintah ini telah berusaha merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok separatis.

Pasukan Ukraina sebagai komponen militer resmi berperan dalam menjaga keamanan dan integritas negara. Dalam operasi militernya, mereka berusaha melawan

kelompok separatis yang menguasai Donbas. Pasukan ini juga mendapat dukungan dan pelatihan dari negara-negara Barat. Di sisi lain, kelompok separatis pro-Rusia, yang aktif di wilayah Donetsk dan Luhansk, telah memproklamkan kemerdekaan dengan mendirikan "Republik Rakyat" Donetsk (DPR) dan "Republik Rakyat" Luhansk (LPR). Kelompok ini memperoleh dukungan militer, finansial, dan politik dari Rusia.

Selain kelompok separatis, ada juga pasukan pro-Rusia yang terdiri dari milisi bersenjata dan sukarelawan yang mendukung kemerdekaan Donbas. Mereka berperan aktif dalam konflik ini dengan mendapat dukungan dari Rusia. Rusia sendiri memegang peran penting, meski secara resmi membantah keterlibatan militer langsung. Namun, terdapat bukti bahwa Rusia telah menyediakan bantuan militer, persenjataan, dan personel untuk mendukung kelompok separatis. Rusia juga terlibat dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini.

Negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa, memberikan dukungan politik dan finansial kepada pemerintah Ukraina. Mereka juga menerapkan sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas aneksasi Krimea dan keterlibatan Rusia dalam konflik di Donbas. Organisasi internasional seperti OSCE dan PBB juga turut berperan. OSCE memiliki misi pengamat di Ukraina yang bertugas memantau gencatan senjata dan pelaksanaan perjanjian Minsk, sementara PBB secara aktif memantau situasi dan telah mengeluarkan resolusi yang mendorong solusi damai terhadap konflik ini.

Peran pihak-pihak ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam konflik Donbas. Upaya diplomasi dan gencatan senjata telah berulang kali gagal, dan konflik ini berlanjut hingga saat ini, dengan dampak signifikan pada warga sipil dan politik regional di Ukraina. (Rahmadhani, Bainus, & Inkiriwang, 2022)

2.2.3 Perkembangan militer dan diplomasi selama konflik

Perkembangan militer di Rusia dan Ukraina telah menjadi fokus utama sejak terjadinya konflik di Donbas pada tahun 2014. Rusia telah meningkatkan modernisasi dan reformasi militer secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan investasi besar dalam pengembangan teknologi militer canggih serta peningkatan kapabilitas angkatan bersenjata mereka. Di sisi lain, Ukraina juga melakukan

reformasi militer yang intensif sebagai respons terhadap agresi Rusia, termasuk restrukturisasi angkatan bersenjata dan modernisasi peralatan, meskipun dengan keterbatasan ekonomi yang signifikan. Konflik ini telah mendorong kedua negara untuk meningkatkan kesiapan militer mereka, menciptakan ketegangan yang berkelanjutan di kawasan tersebut. (Blank, 2020)

Perkembangan militer Rusia dan Ukraina selama konflik di Donbas mencerminkan perubahan dinamika di medan perang. Pada tahap awal, Rusia mendapatkan kritik atas keterlibatannya dalam mendukung kelompok separatis di Donbas melalui penyediaan persenjataan, dukungan logistik, serta kehadiran pasukan khusus tanpa identifikasi jelas. Dengan dukungan Rusia, pasukan separatis mengalami peningkatan dalam hal persenjataan dan jumlah pasukan, termasuk penggunaan senjata canggih seperti rudal anti-pesawat, tank, dan artileri berat. Pasukan separatis semakin terorganisir dan terlatih, yang membuat pasukan Ukraina menghadapi kesulitan lebih besar.

Rusia juga menggunakan taktik asimetris, termasuk kampanye propaganda dan penggunaan pasukan tanpa lambang, yang bertujuan mencapai tujuan militer dan politik di Ukraina. Taktik ini mencakup perang gerilya dan operasi militer terkoordinasi dengan pasukan separatis. Seiring berjalannya waktu, keterlibatan militer Rusia meningkat, dengan bukti menunjukkan kehadiran pasukan reguler Rusia di medan pertempuran Donbas, yang mengubah dinamika konflik secara signifikan. Di sisi lain, Ukraina juga mengalami perkembangan dalam militernya. Reformasi militer menjadi prioritas bagi Ukraina, yang berfokus pada pemodernan peralatan dan peningkatan pelatihan pasukan. Dukungan dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, memainkan peran penting dalam membantu Ukraina melalui bantuan persenjataan dan pelatihan militer.

Dalam menghadapi kelompok separatis, pasukan Ukraina juga mengadopsi taktik militer baru, termasuk perang gerilya dan taktik defensif yang lebih terorganisir. Pasukan infanteri Ukraina dilindungi dengan lebih baik melalui penggunaan peralatan pelindung pribadi dan anti-rudal. Selain itu, pemahaman intelijen militer Ukraina semakin kuat, membantu mereka mengidentifikasi taktik dan posisi pasukan musuh dengan lebih baik, yang memperkuat perlawanan terhadap serangan separatis.

Sementara konflik terus berlanjut, upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian di Ukraina telah melibatkan berbagai aktor internasional. Salah satu upaya penting adalah Perjanjian Minsk I yang disepakati pada September 2014 antara pemerintah Ukraina, kelompok separatis, Rusia, dan OSCE. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata, pertukaran tahanan, serta penerapan reformasi konstitusi di Ukraina, meskipun implementasinya gagal menghentikan pertempuran secara penuh. Pada Februari 2015, disepakati Perjanjian Minsk II, yang lebih komprehensif dan mendetail dibandingkan kesepakatan sebelumnya. Perjanjian ini mencakup rencana untuk gencatan senjata, penarikan senjata berat, pemulihan kendali Ukraina atas perbatasan, dan pelaksanaan reformasi konstitusi. Meskipun berhasil meredam beberapa pertempuran, banyak aspek dari perjanjian ini belum sepenuhnya dijalankan.

Format Normandy yang melibatkan Rusia, Ukraina, Jerman, dan Prancis juga menjadi platform penting dalam perundingan untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, Grup Kontak Trilateral yang melibatkan pemerintah Ukraina, Rusia, dan OSCE berusaha mencari solusi diplomatik dan memfasilitasi gencatan senjata serta pertukaran tahanan. OSCE sendiri memainkan peran signifikan dengan memantau gencatan senjata dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Misi pengamat OSCE di Ukraina memberikan laporan penting mengenai pelanggaran gencatan senjata yang kemudian digunakan dalam proses negosiasi.

Meskipun berbagai upaya internasional telah dilakukan, tantangan besar masih dihadapi, terutama karena perbedaan mendasar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hingga kini, upaya diplomatik terus berlanjut dalam harapan untuk mencapai penyelesaian damai atas konflik di Ukraina. Meskipun telah ada beberapa upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik Ukraina, banyak perjanjian dan gencatan senjata belum berhasil dijalankan sepenuhnya. Perbedaan mendalam antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan isu-isu sensitif terus menjadi hambatan dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Konflik di Ukraina tetap menjadi sumber ketegangan regional dan menjadi perhatian utama dalam hubungan antara Rusia, Ukraina, dan negara-negara Barat. (Rahmadhani, Bainus, & Inkiriwang, 2022)